

Judul : KPK Sisir Aset Tersangka
Tanggal : Senin, 05 Nopember 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

KPK Sisir Aset Tersangka

● DIAN FATH RISALAH
FAUZIAH MURSID

PAN reposisi Taufik pekan ini.

JAKARTA — Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, KPK menyisir sejumlah aset yang diduga milik tersangka bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap terkait penanganan perkara dugaan suap proyek-proyek di Labuhanbatu. Penyisiran aset dilakukan setelah KPK menggelar serangkaian pemeriksaan terhadap sekitar 37 orang saksi di Polres Labuhanbatu sejak 31 Oktober.

"Penyitaan aset-aset ini adalah bagian dari proses penyidikan dan diharapkan nanti akan lebih memaksimalkan pengembalian aset pada masyarakat melalui mekanisme keuangan negara atau memaksimalkan *asset recovery*," kata Febri, Ahad (4/11).

Febri menuturkan, pada Jumat (2/11), penyidik melakukan penyitaan dua bidang tanah yang berlokasi di dekat kantor bupati serta satu unit tanah dan bangunan yang di atasnya berdiri pabrik sawit. Diduga, pabrik sawit tersebut dahulunya milik Pangonal dan pernah dijual kepada Andi Andi Narogong.

Kemudian, pada Sabtu (3/11), dilakukan penyitaan dua unit ruko di Medan, yaitu Gedung Johor Jalan Karya Jaya, Gang Pipa, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. KPK juga telah memasang plang penyitaan di sejumlah lokasi tersebut. "Kemudian Sabtu (3/11) dilakukan penyitaan dua unit ruko di Kota Medan, yaitu di Gedung Johor, Kota Medan. KPK telah memasang plang penyitaan di sejumlah lokasi tersebut," ujarnya.

Febri melanjutkan, sampai saat ini dugaan penerimaan suap terkait proyek di Labuhanbatu cukup signifikan yakni sekitar Rp 50 miliar--sejumlah Rp 46,5 miliar dan sekitar Rp 3 miliar dalam bentuk dolar Singapura. Selain itu, ada pula penerimaan lain yang sedang terus diidentifikasi selama Pangonal menjabat. "Oleh karena itu, untuk memaksimalkan *asset recovery* atau pengembalian uang pada negara, maka KPK terus akan mencari

aset-aset lain yang diduga milik PH," tegasnya.

"Jika masyarakat memiliki informasi, silakan disampaikan kepada KPK. Sekali lagi kami ingatkan juga agar hati-hati membeli aset dengan harga tidak wajar yang terafiliasi dengan kasus Labuhanbatu ini," ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan bupati Labuhanbatu nonaktif Pangonal Harahap sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara. Selain Pangonal, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Yakni Umar Ritonga selaku pihak swasta serta orang kepercayaan bupati dan Effendy Syahputra selaku pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi (BKA).

Kasus Taufik

Di kasus dugaan korupsi lain, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soekarno memastikan pergantian Taufik Kurniawan dari wakil ketua DPR Fraksi PAN dilakukan tengah pekan ini. Eddy menegaskan, Taufik sudah dinonaktifkan dari posisi wakil ketua umum DPP PAN sejak resmi ditahan KPK pada Jumat (2/11) lalu.

Eddy menuturkan, proses pemilihan pimpinan DPR pengganti Taufik masih menunggu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pulang dari luar negeri. "Nanti kita tunggu Pak Zul kembali dari luar negeri. Pak Zul akan kembali pada Selasa. Setelah itu melakukan secara internal yang lebih teknis lagi untuk mendapat hasil terbaik," ujar Eddy.

PAN belum dapat memastikan calon pengganti Taufik di kursi pimpinan DPR. Eddy memastikan pengganti Taufik merupakan salah satu dari 48 anggota fraksi PAN di DPR RI. Menurut dia, tentu anggota DPR yang dipilih adalah yang mempunyai rekam jejak yang baik di lembaga legislatif dan memiliki komitmen pada partai dan koalisi.

"Ya tentu yang punya senioritas. Yang punya rekam jejak yang sudah diketahui baik di lembaga legislatif, jam terbang tinggi, dan komitmen pada partai dan koalisi," ujar Eddy. Taufik menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam APBN 2016. ■ ed: agus raharjo